

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UMKM SEBELUM DAN
SESUDAH MENERIMA PEMBIAYAAN *RAHN TASJILY*
(STUDI PADA NASABAH BMT UGT SIDOGIRI
CAPEM GISTING)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

Nama : Feby Oktariza Halida
NPM : 1751030126

Program Studi : Akuntansi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UMKM SEBELUM DAN
SESUDAH MENERIMA PEMBIAYAAN *RAHN TASJILY*
(STUDI PADA NASABAH BMT UGT SIDOGIRI
CAPEM GISTING)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

Nama : Feby Oktariza Halida
NPM : 1751030126
Program Studi : Akuntansi Syariah

Dosen Pembimbing I : Any Eliza M. Ak
Dosen Pembimbing II : Liya Ermawati M. S. Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan, seperti dalam aspek ekonomi pemerintah telah membuat dan mendukung program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan. Saat ini perkembangan UMKM masih kerap menghadapi hambatan dan rintangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat terutama pada masalah permodalan. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah hadirnya sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mampu menyediakan pembiayaan yang tidak membebani UMKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan UMKM serta apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja UMKM antara sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri Capem Gisting melalui akad *Rahn Tasjily* yang dilihat dari indikator Modal Usaha, Omset Penjualan Dan Profitabilitas (Keuntungan). Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM yang menerima pembiayaan melalui akad *Rahn Tasjily* yaitu sebanyak 58 UMKM. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah Uji Statistik Deskriptif dan Uji Beda Paired T-Test.

Hasil penelitian berdasarkan Uji Beda Paired T-Test untuk variabel modal usaha didapatkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, variabel omset penjualan didapatkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, variabel *profitabilitas* (keuntungan) didapatkan nilai sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada variabel modal usaha, omset penjualan dan *profitabilitas* (keuntungan) setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri Capem Gisting melalui akad *Rahn Tasjily*.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pembiayaan *Rahn Tasjily*.

ABSTRACT

Good economic growth conditions can be used to assess how far the success of the government in carrying out development, such as in the economic aspect the government has created and supported programs with the concept of a people's economy. Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are businesses based on a people's economy. Currently, the development of UMKM still often faces obstacles and obstacles in the face of an increasingly stringent business world, especially in terms of capital. One way that can be used to overcome these problems is the presence of a Microfinance Institution (LKM) that is able to provide financing that does not burden UMKM. Microfinance Institutions (LKM) are financial institutions that provide services to low-income and poor people and small entrepreneurs.

This study aims to see how the financial performance of UMKM and whether there is a significant difference in UMKM performance between before and after receiving financing from BMT UGT Sidogiri Capem Gisting through the Rahn Tasjily contract as seen from the indicators of Business Capital, Sales Turnover and Profitability (Profit). The object of this research is UMKM actors who receive financing through Rahn Tasjily's contract as many as 58 UMKM. The method used in data analysis is Descriptive Statistical Test and Paired T-Test Difference.

The results of the study based on the Different Paired T-Test for the venture capital variable obtained a probability value of $0.000 < 0.05$, the sales turnover variable obtained a probability value of $0.000 < 0.05$, the profitability (profit) variable obtained a value of $0.000 < 0.05$ which This means that there are significant differences in the variables of working capital, sales turnover and profitability (profit) after obtaining financing from BMT UGT Sidogiri Capem Gisting through the Rahn Tasjily contract.

Keywords: Financial Performance, Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM), Rahn Tasjily Financing.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Feby Oktariza Halida
NPM : 1751030126
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA PEMBIAYAAN RAHN TASJILY (STUDI PADA NASABAH BMT UGT SIDOGIRI CAPEM GISTING)”** adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, November 2021



Feby Oktariza Halida
1751030126



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarampe,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030**

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA KEUANGAN UMKM
SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA
PEMBIAYAAN RAHN TASJILY (STUDI PADA
NASABAH BMT UGT SIDOGIRI CAPEM
GISTING)**

**Nama : Feby Oktariza Halida
NPM : 1751030126
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I

**Any Eliza M. Ak
NIP.198308152006012009**

Pembimbing II

**Liya Ermawati M.S.Ak
NIP.198903072019032020**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah**

**Any Eliza M. Ak
NIP.198308152006012009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


**Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame,
Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 704030**

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Rahn Tasjily (Studi pada Nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Gisting)**” disusun oleh **Febby Oktariza Halida, NPM : 1751030126**, Program Studi : **Akuntansi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Jum`at, 19 November 2021.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita., M.Si 

Sekretaris : Muhammad Iqbal Fasa., M.E.I 

Penguji I : Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si 

Penguji II : Any Eliza, M.Ak. 

Penguji III : Liya Erma Wati, M.S., Ak. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Abdul Ghofur, M.Si.
19800801200312100

MOTTO

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ

وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya : Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan an-tara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. (Q.S Fussilat Ayat 34)

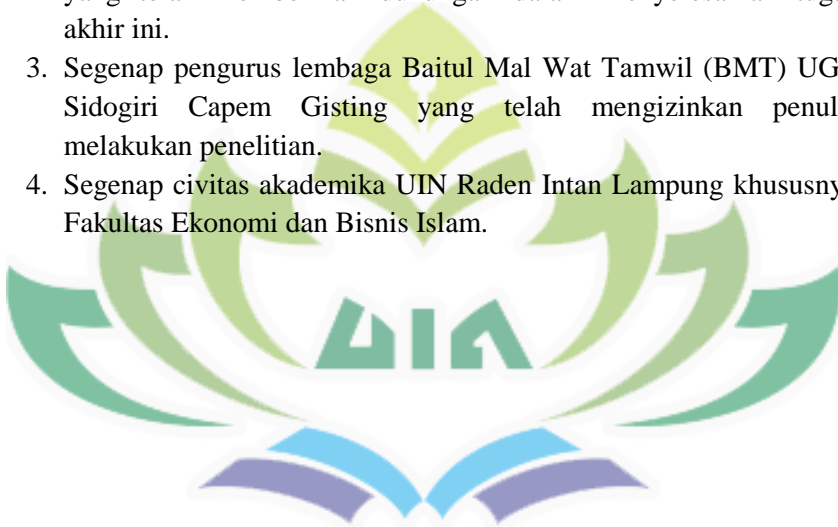


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robil'alamin, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas berkah dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Tukimun dan Ibu Suwarti yang telah memberikan do'a, dan dukungan baik secara moril maupun materil. Membesarkanku selama ini dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
2. Keluarga besar AMPIBI (Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi) yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Segenap pengurus lembaga Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Sidogiri Capem Gisting yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
4. Segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Feby Oktariza Halida. Lahir di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 09 Februari 1999. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Tukimun dan Ibu Suwarti. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu SDN 2 Dadapan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMP Negeri 1 Sumberejo yang lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu SMA N 1 Sumberejo yang lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA PEMBIAYAAN *RAHN TASJILY* (STUDI PADA NASABAH BMT UGT SIDOGIRI CAPEM GISTING)”** tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat banyak pihak yang ikut serta membantu penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih atas peran serta dalam penyusunan skripsi ini, kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur M. SI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa
2. Ibu Any Eliza M. Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah sekaligus Pembimbing Akademik I yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis
3. Ibu Liya Ermawati M. S. Ak selaku Pembimbing Akademik II yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan fikiran untuk membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi
4. Baitul Mal Wat Tamwil UGT Sidogiri Cabang Pembantu Gisting yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian terhadap UMKM yang menerima pembiayaan dengan akad *Rahn Tasjily*
5. Bapak dan Ibu Dosen, Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam bidang literasi.

Bandar Lampung, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| ABSTRACT..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN..... | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR BAGAN..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang..... | 2 |
| C. Identifikasi dan Batasan Masalah | 11 |
| D. Rumusan Masalah..... | 11 |
| E. Tujuan Penelitian | 11 |
| F. Manfaat Penelitian | 12 |
| G. Studi Pustaka..... | 12 |
| H. Sistematika Penulisan | 22 |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN | |
| HIPOTESIS | 25 |
| A. Landasan Teori | 25 |
| 1. Kinerja Keuangan | 25 |
| a. Definisi Kinerja Keuangan | 25 |
| b. Tujuan dan Manfaat Analisis Kinerja Keuangan..... | 25 |
| 2. Baitul Mal Wat Tamwil | 28 |
| a. Definisi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)..... | 28 |
| b. Sejarah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)..... | 30 |

| | |
|---|------------|
| c. Fungsi dan Peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)..... | 33 |
| d. Status Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) .. | 36 |
| e. Akad dan Produk Baitul Maal wat Tamwil (BMT)..... | 39 |
| f. Karakteristik Baitul Mal wat Tamwil (BMT)..... | 49 |
| 3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 52 |
| a. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 52 |
| b. Peran Strategis UMKM | 54 |
| c. Perkembangan UMKM..... | 55 |
| d. Permasalahan UMKM | 56 |
| 4. Pembiayaan Rahn Tasjily | 61 |
| a. Definisi Pembiayaan Rahn Tasjily | 61 |
| b. Dasar Hukum Rahn Tasjily | 63 |
| c. Rukun dan Syarat Rahn Tasjily | 65 |
| d. Tujuan Pembiayaan | 66 |
| e. Manfaat Pembiayaan | 66 |
| B. Kerangka Berfikir | 67 |
| C. Hipotesis | 68 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 69 |
| A. Tempat dan Waktu Penelitian | 69 |
| B. Jenis dan Sumber Data Penelitian..... | 69 |
| C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data | 70 |
| D. Definisi Operasional Variabel..... | 72 |
| E. Instrumen Penelitian | 73 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 73 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 77 |
| A. Deskripsi Data..... | 77 |
| B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian .. | 91 |
| BAB V PENUTUP | 107 |
| A. KESIMPULAN..... | 107 |
| B. REKOMENDASI | 108 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Kontribusi UMKM terhadap PDB | 3 |
| Tabel 1.2 Data Pembiayaan Tahun 2016-2020 | 7 |
| Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu | 11 |
| Tabel 2.1 Perbandingan BMT dengan Koperasi dan Firma/CV | 32 |
| Tabel 2.2 Karakteristik LKMS (BMT) | 49 |
| Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional Variabel..... | 72 |
| Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden | 83 |
| Tabel 4.2 Status Pendidikan | 88 |
| Tabel 4.3 Lama Usaha..... | 90 |
| Tabel 4.4 Uji Statistik Deskriptif Modal Usaha | 92 |
| Tabel 4.5 Uji Statistik Deskriptif Omset Penjualan | 94 |
| Tabel 4.6 Uji Statistik Deskriptif <i>Profitabilitas</i> (Keuntungan) | 96 |
| Tabel 4.7 Uji Beda Paired T-Test Modal Usaha | 97 |
| Tabel 4.8 Uji Beda Paired T-Test Omset Penjualan..... | 98 |
| Tabel 4.9 Uji Beda Paired T-Test <i>Profitabilitas</i> (keuntungan) | 99 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1 Diagram Jenis Kelamin Responden..... | 87 |
| Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan Responden..... | 89 |
| Gambar 4.3 Lama Usaha..... | 90 |
| Gambar 4.4 Rata-Rata Modal Usaha Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan dari BMT..... | 92 |
| Gambar 4.5 Rata-Rata Omset Penjualan Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan dari BMT..... | 94 |
| Gambar 4.6 Rata-Rata <i>Profitabilitas</i> (Keuntungan) Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan dari BMT..... | 96 |



DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 2.1 Asal Usul Akad | 39 |
| Bagan 2.2 Kerangka Berfikir Teoritis | 67 |
| Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pengurus..... | 78 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dengan penegasan judul yang dibuat, diharapkan tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dalam memahami judul terhadap beberapa istilah yang penulis gunakan. Adapun judul skripsi ini adalah “ANALISIS KINERJA KEUANGAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA PEMBIAYAAN *RAHN TASJILY* (STUDI PADA NASABAH BMT UGT SIDOGIRI CAPEM GISTING)”

Dengan uraian sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba.²

3. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 37.

² Sucipto, "Penilaian Kinerja Keuangan", *Jurnal Akuntansi Universitas Sumatera Utara*, Medan, (2003), 13.

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.³

4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴

5. Rahn Tasjily

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman.⁵

6. BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

Menurut Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membelakepentingan kaum fakir miskin.

B. Latar Belakang

Kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik pada saat ini dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembangunan, seperti dalam aspek ekonomi pemerintah telah membuat dan mendukung program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ini merupakan gagasan terkait bagaimana cara, sifat serta tujuan pembangunan dengan sasaran utama yaitu perubahan nasib masyarakat kalangan menengah ke bawah. Konsep ini merancang perubahan

³ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1.

⁴ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 131.

⁵ Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008

penting ke arah kemajuan, yang dapat membantu dalam mengatasi masalah serta rintangan yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan.⁶

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang sering disebut dengan UMKM merupakan suatu usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan. UMKM adalah bisnis berskala kecil yang mampu memberikan banyak kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika krisis ekonomi melanda dunia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 otomatis memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Namun pada saat itu hanya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Alasan UMKM dapat bertahan dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal yang besar, sebagian besar UMKM menggunakan modal sendiri untuk membuka usahanya.⁷

Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dalam Produk Domestik Bruto (PDB) berikut :

Tabel 1.1
Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

| Tahun | UMKM / % |
|--------------|-----------------|
| 2016 | 57,10 % |
| 2017 | 57,20 % |
| 2018 | 60,00 % |
| 2019 | 60,30 % |
| 2020 | 61,00 % |

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2016-2020

Sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa UMKM memiliki

⁶ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 161.

⁷ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol.6 No.1, 2017, 51.

pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun, pada era globalisasi ini perkembangan UMKM masih kerap menghadapi hambatan dan rintangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Hambatan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM antara lain : minimnya permodalan baik dari segi jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam hal manajerial dan keterampilan usaha, lemahnya organisasi serta terbatasnya pemasaran. Selain itu, ada beberapa hal yang juga menjadi hambatan para pelaku UMKM seperti persaingan antar usaha yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga membuat ruang lingkup usaha semakin terbatas. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah hadirnya sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mampu menyediakan pembiayaan yang tidak membebani UMKM. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin serta para pengusaha kecil. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga didefinisikan sebagai penyedia bermacam bentuk pelayanan keuangan bagi individu, keluarga berpenghasilan rendah maupun usaha mikro, kecil dan menengah yang tengah berkembang.⁸

Terdapat 2 jenis Lembaga Keuangan Mikro yaitu Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS. Hadirnya KJKS dalam pemberdayaan masyarakat khususnya pelaku UMKM melalui sistem simpan pinjam syariah merupakan alternatif yang cukup inovatif dalam jasa keuangan. Prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam kegiatan usaha pinjaman KJKS adalah berdasarkan sistem bagi hasil. Salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum KJKS adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

BMT merupakan pendekan dari kata Balai Usaha

⁸ I Gde Kajeng Baskara, "*Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*", Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, 2018, 118.

Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Badan Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam : keselamatan (berintikan keadilan, kedamaian, kesejahteraan).⁹

BMT terdiri dari 2 fungsi, yaitu : Baitut tamwil (rumah pengembangan harta), yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi dan Baitul maal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT), merupakan lembaga keuangan yang sangat maju dalam perkembangannya dan

⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar – Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 380.

sukses dikalangan masyarakat ekonomi menengah dan bawah. Ini dapat dilihat di Lampung, keberadaan BMT mulai dirintis dengan adanya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dan pada tahun 1996 Lahirlah BMT Swadaya dengan berdiri 30 BMT. Sedang pada tahun 1998 dengan bantuan Pemerintah propinsi ketika itu membantu berdirinya 17 BMT, berkembang kembali pada tahun 1999 dengan melahirkan 60 BMT serta diberi modal lima ratus ribu per BMT. Di tahun yang sama muncul 75 BMT dengan pemberian modal sebesar Rp 1.500.000 tiap BMT. Pada Tahun selanjutnya Pemerintah juga memberi bantuan modal terhadap 60 BMT yang baru berdiri dengan kisaran modal yang sama. Pada tahun 2002 lahir lagi 60 BMT di Propinsi Lampung dengan pemberian modal awal Rp 2.000.000 tiap BMT. Dengan berjalannya waktu kemudian mulai bermunculan BMT-BMT baru dan berkembang dengan baik seperti BMT As Syifa di Metro, BMT Mentari di Kota Gajah, BMT Pringsewu, BMT Bagas di Lampung Timur, dan BMT Fajar di Metro. Dan pada akhir Desember 2015, jumlah Koperasi di Provinsi Lampung sebanyak 5.095 unit Koperasi. Terdiri dari 2.760 Koperasi aktif dan 2.335 Koperasi tidak aktif.¹⁰

BMT UGT Sidogiri Capem Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri yang disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang

¹⁰ Azyumardi Azra, *Berdema Untuk Semua*, (Jakarta : PT.Mizan Publika,2013), 236 .

menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah. Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang di singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.¹¹

Dalam pembiayaan permodalan untuk UMKM, akad yang biasanya digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Gisting adalah akad Mudharabah, akad Murabahah, akad Ijarah, dan akad Rahn Tasjily. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 tentang pembiayaan yang digunakan BMT UGT Sidogiri Capem Gisting sebagai berikut :

¹¹ Diakses melalui <https://bmtugtsidogiri.co.id/>, pada 26 Januari 2021 pukul 11.44 WIB

Tabel 1.2
Data pembiayaan Tahun 2016-2020 (Dalam Juta Rupiah)

| Akad | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mudharabah | 7.750 | 9.400 | 12.000 | 14.250 | 14.800 |
| Murabahah | 6.700 | 8.800 | 7.550 | 6.350 | 9.800 |
| Rahn Tasjily | 10.200 | 11.300 | 15.750 | 17.500 | 20.700 |
| Ijarah | 4.000 | 7.500 | 5.450 | 6.600 | 9.750 |

Sumber : BMT UGT Sidogiri Capem Gisting

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan UMKM lebih banyak menggunakan akad *Rahn Tasjily* dibandingkan pembiayaan dengan akad lain. *Rahn Tasjily* adalah akad pembiayaan dengan pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT. Jika pada umumnya akad yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM adalah akad Mudharabah, namun pada BMT UGT Sidogiri akad yang digunakan adalah akad *Rahn Tasjily*. Hal ini dikarenakan keunggulan yang dimiliki oleh akad *Rahn Tasjily* yaitu minimnya tingkat resiko kerugian yang akan diperoleh BMT. Jika menggunakan akad Mudharabah, BMT akan memiliki tingkat resiko kerugian yang tinggi dikarenakan seluruh modal yang digunakan untuk usaha berasal dari BMT. Apabila usaha tersebut mengalami kebangkrutan maka akan ditanggung oleh BMT sepenuhnya. Penyebab lain akad mudharabah jarang digunakan adalah karena BMT kurang mampu meninjau secara langsung usaha yang dilakukan oleh seluruh pelaku UMKM.

Nasabah BMT UGT Sidogiri adalah pedagang-pedagang pasar Gisting Bawah Kabupaten Tanggamus. Para pelaku UMKM memilih BMT UGT Sidogiri karena BMT UGT Sidogiri mampu membantu mengatasi kendala dalam hal permodalan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM melalui akad *Rahn Tasjily*. Pembiayaan dengan akad *Rahn Tasjily*

dipilih karena pada pembiayaan yang menggunakan akad *Rahn Tasjily*, perolehan modalnya adalah dengan menggadaikan surat berharga yang dimiliki. Seperti Sertifikat tanah, BPKB Kendaraan, Sertifikat rumah, dsb. Pembiayaan *Rahn Tasjily* pada BMT UGT Sidogiri digunakan sebagai pembiayaan untuk UMKM yang memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usahanya. Sebelum para pelaku UMKM menerima pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri, kondisi kinerja keuangan UMKM masih tergolong lemah. Hal ini dikarenakan tidak cukupnya modal yang mereka miliki untuk mengembangkan usahanya sehingga berdampak pada *profitabilitas* dan omset penjualan yang tidak maksimal. Namun, setelah menerima pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri, kondisi kinerja keuangan UMKM berkembang pesat. Hal ini dipengaruhi adanya tambahan modal yang diterima oleh para pelaku UMKM sehingga *profitabilitas* dan omset penjualan yang didapatkan menjadi meningkat. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan UMKM diukur dari jumlah modal, *profitabilitas* (laba bersih) dan omset penjualan (laba kotor).

Akad *Rahn Tasjily* termasuk salah satu akad yang diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam al-quran dan sunnah. Dalil umum dibolehkannya akad *Rahn Tasjily* berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah: 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ فَليُؤَدِّ الَّذِي أُوْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu

mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Febrian Tri Irawan dan Ratna Mulyani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul **“Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah”** menunjukkan bahwa pembiayaan syariah (Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah) berperan dalam perkembangan kinerja keuangan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya perbedaan dan peningkatan jumlah pelanggan dan karyawan berdasarkan penerimaan pembiayaan syariah oleh UMKM. Sedangkan, penelitian Siti Jubaedah dan Rina Destiana (2016) yang berjudul **“Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah”** menunjukkan bahwa terdapat perkembangan jumlah aset, omset penjualan dan laba bersih UMKM di Kabupaten Cirebon setelah menerima pembiayaan syariah. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian dimana Output SPSS menunjukkan bahwa rata-rata jumlah aset UMKM sebelum mendapatkan pembiayaan syariah sebesar Rp 57.847.760,60 sedangkan rata-rata jumlah aset UMKM sesudah mendapatkan pembiayaan syariah sebesar Rp 73.166.618,53. Perbedaan kedua penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada variabel akad pembiayaan yang akan diteliti, metode yang digunakan, jumlah sampel, instrumen/teknik pengumpulan data yang digunakan dan lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis bagaimana perkembangan kinerja keuangan UMKM sebelum dan setelah menerima pembiayaan *Rahn Tasjily* pada Bitul Maal wat Tamwil di Kota Bandar Lampung dengan mengangkat tema **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN UMKM SEBELUM DAN SESUDAH MENERIMA PEMBIAYAAN RAHN**

TASJILY (STUDI PADA NASABAH BMT UGT SIDOGIRI CAPEM GISTING)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Mengingat akan keterbatasan pemikiran dan waktu, maka penulis akan membuat batasan masalah terhadap penelitian yang akan dilakukan terkait analisis kinerja keuangan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *Rahn Tasjily* pada Koperasi Jasa Keuangan Baitul Maal wat Tamwil. Batasan masalah tersebut adalah :

Pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKM) memiliki peranan penting dalam permodalan UMKM guna meningkatkan kinerja keuangan yang dapat dilihat melalui perubahan *Profitabilitas*, Omset penjualan serta jumlah asset yang dimiliki. Penelitian ini dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Gisting, Kabupaten Tanggamus, Bandar Lampung. Kinerja keuangan UMKM yang akan diteliti adalah UMKM yang menerima pembiayaan *Rahn Tasjily* yang digunakan sebagai tambahan modal usahanya.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *Rahn Tasjily* pada Koperasi Jasa Keuangan BMT UGT Sidogiri Capem Gisting?
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *Rahn Tasjily*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *Rahn Tasjily* pada Koperasi Jasa Keuangan BMT UGT Sidogiri Capem Gisting.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *Rahn Tasjily*.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori mengenai pembiayaan *Rahn Tasjily* yang baik dan dengan adanya penelitian ini penulis dapat memperoleh pengalaman serta wawasan yang luas mengenai pembiayaan *Rahn Tasjily* dan manfaat dari pembiayaan *Rahn Tasjily* yang dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disebut dengan UMKM.

2. Bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Dapat digunakan oleh UMKM dalam memperoleh informasi terkait bagaimana perkembangan usahanya sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *Rahn Tasjily* secara jelas dan terperinci melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

3. Bagi BMT

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta edukasi bagi BMT UGT Sidogiri Capem Gisting dalam memberikan pelayanan pada penyediaan pembiayaan syariah terhadap UMKM dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily*.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya secara kritis dan lebih mendalam lagi terkait dengan hal-hal yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

5. Bagi pembaca

Penelitian ini memberikan sumbangan pikiran dan saran dalam hal pembiayaan syariah sekaligus memberikan informasi terkait hasil aktivitas pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tentu bermanfaat bagi pembaca.

G. Studi Pustaka

Sebelum melakukan penelitian terkait dengan tema yang telah ditentukan, penulis melakukan penelaahan penelitian terdahulu

yang relevan dengan judul dari penelitian ini yaitu “Analisis Kinerja Keuangan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan *Rahn Tasjily* (Studi Pada Nasabah BMT UGT Sidogiri Capem Gisting)”. Tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kesamaan pembahasan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, penulis mencoba menjelaskan kajian dan pembahasan dari hasil penelaahan yang telah dilakukan sebagai berikut :

Tabel 1.3
(Penelitian Terdahulu)

| NO | NAMA PENELITI | JUDUL PENELITIAN | HASIL PENELITIAN |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | Wahyu Nur Sakson gko | Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Murabahah Pada BMT JANNAH Pucung Sragen | Hasil penelitian menunjukkan pada modal usaha sebelum pembiayaan p-value (sig) 0,000 < 0,05 dan t-hitung 7,674 > t-tabel 1,9896, modal sesudah pembiayaan p-value (sig) 0,000 < 0,05 dan t-hitung 8,339 > t-tabel 1,9896, omset penjualan sebelum pembiayaan p-value (sig) 0,000 < 0,05 dan t-hitung 12,970 > t-tabel 1,9896, omset sesudah pembiayaan p- |

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| | | | <p>value (sig) 0,000 < 0,05 dan t-hitung 14,517 > t-tabel 1,9896, jumlah tenaga kerja sebelum pembiayaan p-value (sig) 0,000 < 0,05 dan t-hitung 17,204 > t-tabel 1,9896, jumlah tenaga kerja sesudah pembiayaan p-value (sig) 0,000 < 0,05 dan t-hitung 23,506 > t-tabel 1,9896, artinya H_1 : diterima dan H_0 : ditolak.</p> |
| 2. | Nailah Rizkia | <p>Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Bank Umum Syariah</p> | <p>Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa usaha UMKM mengalami perkembangan setelah menerima pembiayaan dari Bank Umum Syariah. Hal ini dapat di buktikan dengan Berdasarkan</p> |

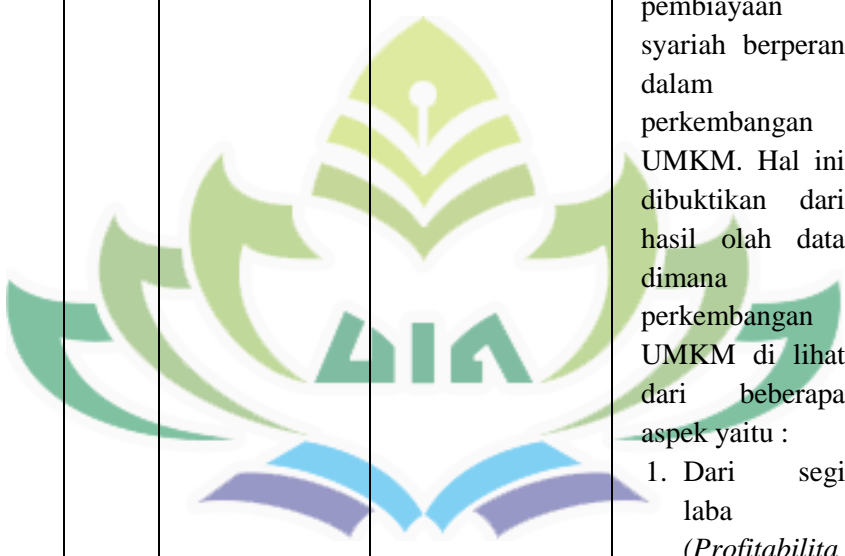
| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>pada hasil uji pangkat tanda Wilcoxon untuk variabel modal usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,002 ($<0,05$), variabel omzet penjual didapatkan nilai -p sebesar 0,002 ($<0,05$), variabel keuntungan usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,002 ($<0,05$), variabel tenaga kerja didapatkan nilai -p sebesar 0,005 ($=0,05$), dan variabel cabang usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,083 ($>0,05$) yang berarti ada beda pada variabel modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, tenaga kerja sebelum dan sesudah memperoleh</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|---------------|--|---|
| | | | <p>pembiayaan dari bank syariah . Dan untuk variabel cabang usaha tidak terdapat perbedaan cabang usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah.</p> |
| 3. | Hana Maisaroh | <p>Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Ukm) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Bank Umum Syariah</p> | <p>Pada penelitian ini ditemukan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dari hasil uji pangkat tanda Wilcoxon untuk variabel modal usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,002 ($<0,05$), variabel omzet penjual didapatkan nilai -p sebesar 0,002 ($<0,05$), variabel keuntungan usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,002 ($< 0,05$), variabel tenaga</p> |




| | | | |
|----|-------------------------------|--|--|
| | | | <p>kerja didapatkan nilai $-p$ sebesar 0,005 ($=0,05$), dan variabel cabang usaha didapatkan nilai $-p$ sebesar 0,083 ($> 0,05$) yang berarti ada beda pada variabel modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, tenaga kerja sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Dan untuk variabel cabang usaha tidak terdapat perbedaan cabang usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah.</p> |
| 4. | Siti Jubaedah & Rina Destiana | Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perkembangan jumlah aset, omset penjualan |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah. | dan laba bersih UMKM di Kabupaten Cirebon setelah mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon. Dari hasil pengujian, <i>output SPSS</i> kenaikan rata- rata jumlah aset UMKM sesudah mendapatkan pembiayaan syariah. |
| 5. | Febrian Tri Irawan & Ratna Mulyani | Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh) | Hasil penelitian ini menemukan adanya perbedaan dan peningkatan laba berdasarkan uji statistik deskriptif dan uji rank Wilcoxon. Begitu juga dengan aspek pelanggan dan karyawan, penelitian ini menemukan bahwa terdapat |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>perbedaan dan peningkatan jumlah pelanggan dan karyawan berdasarkan penerimaan pembiayaan syariah oleh UMKM.</p> <p>Artinya, pembiayaan syariah berperan dalam perkembangan UMKM. Hal ini dibuktikan dari hasil olah data dimana perkembangan UMKM di lihat dari beberapa aspek yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari segi laba (<i>Profitabilitas</i>) mengalami kenaikan yang cukup pesat dimana jumlah responden yang mengalami peningkatan laba setelah |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>menerima pembiayaan syariah dari PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh meningkat dan mendapatkan kenaikan laba pada usahanya.</p> <p>2. Dari segi konsumen nilai minimum jumlah konsumen pada saat sebelum menerima pembiayaan sebanyak 60 konsumen. Sesudah menerima pembiayaan jumlah konsumen mengalami peningkatan menjadi 2400 konsumen. Nilai rata-rata jumlah konsumen dari</p> |
|--|--|--|--|



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>93 responden adalah 740.32 responden dalam satu bulan. Setelah menerima pembiayaan syariah jumlah konsumen minimum masih sama di angka 60, akan tetapi jumlah konsumen maximum meningkat menjadi 3600 konsumen. Nilai rata-rata sesudah menerima pembiayaan syariah juga membuktikan hasil meningkat yaitu 1183.23.</p> <p>3. Dari segi tenaga kerja Setelah menerima pembiayaan syariah jumlah tenaga kerja</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | paling sedikit masih berjumlah 1, sedangkan jumlah tenaga kerja paling banyak meningkat menjadi 12. |
|--|--|--|---|

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan serta hasil dari penelitian akan disajikan dengan sistematika berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bagian pendahuluan ini memuat latar belakang yang menjelaskan terkait dengan alasan dalam melakukan penelitian ini. Kemudian membahas mengenai batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan terkait dengan teori-teori yang mendukung atas penelitian yang akan dilakukan, antara lain Kinerja Keuangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pembiayaan *Rahn Tasjily*. Bab ini juga menjelaskan terkait dengan Hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian serta hasil dari analisis data yang menggunakan Uji Statistik Deskriptif dan Uji Beda Paired T-Test.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan hasil analisis.





BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan

a. Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah sesuatu yang telah dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Ukuran untuk menentukan suatu kinerja usaha mikro menggunakan banyak indikator, seperti modal usaha, jumlah penjualan, keuntungan, harta kekayaan usaha, aset dan sebagainya. Kinerja keuangan merupakan pencapaian atau prestasi yang telah diraih oleh manajemen usaha/organisasi dalam menjalankan fungsinya mengelola aset organisasi secara efektif dalam periode tertentu.¹²

Secara garis besar, pengertian kinerja keuangan adalah hasil kerja berbagai bagian dalam suatu organisasi yang bisa dilihat pada kondisi keuangan organisasi pada suatu periode tertentu terkait aspek penghimpunan dan penyaluran dana yang dinilai berdasarkan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan *profitabilitas*. Kinerja keuangan juga diartikan sebagai gambaran pencapaian usaha berupa hasil yang telah dicapai melalui berbagai aktivitas untuk meninjau sejauh mana suatu usaha telah melaksanakan standar akuntansi keuangan secara baik dan benar yang mencakup tujuan dan contoh analisis laporan keuangan.¹³

b. Tujuan dan Manfaat Analisis Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah prospek atau masa depan, perkembangan dan potensi pertumbuhan yang baik bagi suatu usaha/organisasi.

Informasi yang didapatkan dari analisis kinerja keuangan sangat diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber

¹² Liesma Maywarni Siregar, “*Kinerja Keuangan Usaha Mikro dan Kecil*”, Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa Vol.5 No.2-Desember 2020,124.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di Akses pada Tanggal 19 Januari 2021.

daya ekonomi dalam memperkirakan kapasitas produksi dari sumber daya yang tersedia. Dengan adanya kinerja keuangan, suatu usaha dapat dengan mudah mengetahui kondisi keuangan usaha disetiap periode tertentu.

Adapun Tujuan dari Analisis Kinerja Keuangan adalah :

1) Mengetahui tingkat Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan usaha/organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo.

2) Mengetahui tingkat Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik dalam jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

3) Mengetahui tingkat Rentabilitas

Rentabilitas menunjukkan kemampuan dalam mendapatkan laba selama periode tertentu.

4) Mengetahui tingkat Stabilitas

Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar serta melunasi setiap hutang dan beban bunga tepat pada saat jatuh tempo

Sedangkan manfaat dari Analisis Kinerja Keuangan adalah :

- 1) Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha yang telah dicapai dalam periode tertentu
- 2) Dapat digunakan sebagai acuan dan dasar pertimbangan dimasa yang akan datang
- 3) Digunakan dalam memberikan arahan untuk membuat suatu keputusan
- 4) Digunakan untuk melihat kinerja keuangan suatu usaha/organisasi secara keseluruhan
- 5) Digunakan sebagai penilaian kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan suatu usaha.¹⁴

¹⁴ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara., 2009), 99.

c. Indikator Kinerja Keuangan

Tolak ukur keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah kinerja keuangan dan *image* perusahaan itu sendiri. Setelah jangka waktu tertentu usaha tersebut akan mengalami peningkatan baik dalam permodalan, skala usaha, *profitabilitas*, jenis usaha dan sebagainya. Keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari analisis kinerja perusahaan yang dapat diukur sehingga bersifat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Modal Usaha

Modal merupakan salah satu faktor penting selama proses produksi, sebab modal dibutuhkan saat pengusaha akan mendirikan suatu usaha atau untuk memperluas usaha yang telah ada, nominal modal yang minim akan berpengaruh pada lancarnya usaha, sehingga akan berdampak pada pendapatan yang diperoleh. Modal bisa berasal dari modal sendiri atau modal pinjaman dari suatu lembaga baik lembaga perbankan ataupun lembaga non perbankan. Sesuai dengan karakteristik usahanya, sebenarnya UMKM tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Namun, minimnya modal yang digunakan oleh para pelaku usaha akan menghambat pertumbuhan UMKM sehingga sulit untuk berkembang.¹⁶

2) Omset Penjualan

Omset penjualan identik dengan volume penjualan. Omset penjualan akan mengalami peningkatan apabila adanya kegiatan penjualan yang efektif. Omset penjualan dapat diartikan sebagai jumlah keseluruhan penjualan dalam periode tertentu. Semakin tinggi omset

¹⁵*Ibid.*, Liesma Maywarni Siregar, “Kinerja Keuangan Usaha Mikro dan Kecil”, 125.

¹⁶ Nur Fajar Istinganah dan Widiyanto, “Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Perkembangan UKM”, *Economic Education Analysis Journal*, 2020, 441.

penjualan yang dihasilkan maka *Profitabilitas* atau keuntungan bersih yang didapatkan akan semakin tinggi. Besar kecilnya omset penjualan selain ditinjau dari faktor modal usaha, juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam pemasaran kondisi pasar dan sebagainya.¹⁷

3) *Profitabilitas* (Keuntungan)

Profitabilitas (Keuntungan) adalah laba operasi dikurangi seluruh biaya administrasi. Dalam penelitian ini, *Profitabilitas* diukur dengan pendapatan bersih yang diperoleh UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan *Rahn Tasjily* dari BMT UGT Sidogiri Capem Gisting.¹⁸

2. Baitul Mal Wat Tamwil

a. Definisi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, dikenal 3 institusi keuangan yang menggunakan istilah hampir sama yaitu Baitul Mal, Baitul Tamwil, dan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah Lembaga keuangan syariah yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal terfokus kepada usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat nonprofit, seperti sedekah, infaq dan zakat. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat komersial. Seluruh usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BMT selaku lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat menengah dan bawah yang berlandaskan pada hukum islam. BMT hadir dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak mendapatkan perhatian serta pelayanan Bank Islam

¹⁷ Suprihatmi Sri Wardiningsih, “Pengaruh Modal Kerja, Aset, dan Omzet Penjualan Terhadap Laba UKM Catering di Wilayah Surakarta”, Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol.5 No.1, 2017, 91.

¹⁸ Siti Jubaedah dan Rina Destiana, *Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah*, Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi Volume 2 Isue 2, 2016, 97.

atau BPR Islam. BMT memiliki prinsip operasi yang didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli atau *Ijarah*, dan titipan atau *Wadiah*. BMT mempunyai pangsa pasar masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan juga pelaku UMKM yang mengalami berbagai hambatan.¹⁹

Istilah Baitul Maal berasal dari bahasa arab, yaitu kata bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi, Baitul maal secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, Baitul Maal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Baitul Maal dilihat dari segi istilah fiqh dapat diartikan sebagai suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.²⁰

Baitul Tamwil merupakan rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Adapun Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan gabungan dari kedua istilah tersebut yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil.

Terdapat beberapa pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT), antara lain :

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan.²¹ Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

¹⁹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*,(Jakarta:PT. Fajar Interprata Mandiri, 2010), 363.

²⁰ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, (Bandung:PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2010), 71.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 114.

juga diartikan sebagai balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal wat Tamwil. Dari segi Baitul Maal, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, infaq, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.²²

b. Sejarah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Sesuatu yang revolusioner untuk masa itu telah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut Baitul Mal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan yang bertujuan sebagai *welfare oriented* yang pada masa itu sangat asing.

Dikatakan sangat asing karena pada umumnya pada saat itu pajak yang dikumpulkan oleh para penguasa dikerajaan-kerajaan tetangga disekitar Jazirah Arabia, seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh seorang menteri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kaisar dan raja. Kalaupun lembaga Baitul Mal yang menurut pada orientalis bukan sesuatu yang baru, maka proses siklus dana masyarakat (zakat, wakaf, ushr dan sebagainya) yang dinamis dan berputar dengan cepat merupakan preseden yang sama sekali baru.²³

Para penulis muslim memiliki perbedaan pendapat dalam hal fungsi Baitul Mal ini. Sebagian berpendapat bahwa Baitul Mal serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang walaupun lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Baitul Mal berfungsi sebagai menteri keuangan atau bendahara negara masa kini, karena fungsinya yang aktif

²² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aaspek Hukum BMT...*, 72

²³ M. Ahyar Maarif, "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin", *Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 2, Juni 2019, 40.

dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya sekedar berfokus pada pengaturan suplai dan moneter. Namun, seiring dengan keperluan zaman kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan.

Baitul Mal semakin mapan bentuknya pada zaman khalifah Umar bin Khatab. Pada masanya sistem administrasi dan pembentukan dewan-dewan dilakukan untuk ketertiban administrasi. Umar juga meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya. Di lain pihak, ia sangat memperhatikan kesejahteraan kaum Muslimin sehingga terlahir ucapannya yang terkenal bahwa: *“jika ada keledai yang terperosok di Irak, ia akan ditanya oleh Tuhan mengapa ia tidak meratakan jalan tersebut”*. Kebijakan Umar diteruskan oleh Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, serta khalifah-khalifah berikutnya. Perlu dicatat dalam periode ini adalah bahwa para khalifah rasyidin itu amat serius dalam memikirkan kesejahteraan rakyat dengan memfungsikan secara maksimal pendapatan dan penerimaan dalam Baitul Maal. Fungsi Baitul Maal sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal ini tentu hanya dapat terlaksana dengan pribadi-pribadi yang jujur dan amanah tersebut.²⁴

Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dan diganti oleh Mu'awiyah yang lalu diteruskan oleh anaknya, Yazid, lembaga syuro dalam politik pemerintahan islam bergeser menjadi dinasti/kerajaan. Meskipun begitu, fungsi Baitul Mal tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, mulai terjadi disfungsi pada pengeluaran-pengeluaran disebabkan tingkat ketaatan agama khalifah-khalifah pada dinasti Umawiyah tidak sebagaimana pada Khulafaur Rasyidin. Hanya satu khalifah pada dinasti ini yang dikagumi karena keadilan dan kesalehannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, sehingga dikenal dengan Umar II. Pada masa pemerintahannya yang pendek, sekitar 2,5 tahun , ia mampu

²⁴ Philip K. Hitti, *History Of The Arabs*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), 219.

mendistribusikan pendapatan negara sedemikian rupa sehingga dapat menyejahterakan rakyatnya. Karena sejahteranya rakyat pada masa itu sehingga susah dicari orang yang menerima zakat.

Dinasti Umawiyah di Damaskus berakhir dengan naiknya Dinasti Abassiyah. Sepanjang dinasti ini terjadi perubahan pola-pola ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan dari salah satu khalifahnya untuk menciptakan standar uang bagi kaum Muslimin. Hal itu dilakukan karena ada kecenderungan orang menurunkan nilai uang emas dan perak serta mencampurkan dengan logam yang lebih rendah. Sejak saat itu fungsi Baitul Maal telah bertambah, yang tadinya hanya mengeluarkan kebijakan fiskal, sekarang mengatur kebijakan moneter juga. Kebijakan fiskal telah dikembangkan secara ilmiah dengan munculnya kitab-kitab, seperti *Khitabul Kharaj*-nya Abu Yusuf dan *Khitabul Amwal*-nya Qadamah bin Ja'far. Pada zaman keemasan dinasti ini fungsi Baitul Mal merambah ke pada pengeluaran untuk riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani, selain untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai.

Dinasti Abassiyah pudar kemudian berganti dengan Turki Seljuq di Asia Tenggara, Sasanid di Cordova, serta Fathimiyah di Mesir, dan terakhir Turki Usmani di Istanbul. Selama itu pula fungsi Baitul Maal berkembang menjadi perbendaharaan negara dan pengatur kebijakan fiskal dan moneter. Sepanjang dinasti ini, kekayaan Baitul maal selain dalam bentuk fisik juga dalam bentuk uang yang tidak berubah berupa emas dan perak. Etika dalam bidang keuangan tetap dijaga, seperti tidak adanya riba sehingga nilai uang stabil, tidak pernah terjadi krisis, dan kesejahteraan masyarakat terjamin.

Runtuhnya Dinasti Usmaniyah di Turki menandakan menangnya kolonialisme di negeri-negeri Islam, baik secara fisik maupun pemikiran. Karena itu, meskipun kemudian negeri-negeri Islam merdeka dari penjajahan, nama Baitul Maal tidak pernah muncul lagi, padahal fungsinya dalam

negara tetap dilaksanakan, seperti kebijakan fiskal dan moneter.²⁵

c. Fungsi dan Peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Fungsi dari Baitul Mal Wat Tamwil adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai penghimpun dana dan penyalur dana, saat menyimpan uang di BMT uang tersebut bisa ditingkatkan utilitasnya, maka dari itu timbulah unit surplus (pihak yang kelebihan dana) dan unit defisit (pihak yang tidak cukup memiliki dana).
- 2) Sumber pendapatan, BMT mampu membuka kesempatan kerja serta memberikan pendapatan kepada seluruh pegawainya.
- 3) Penyedia informasi, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan adanya risiko keuntungan serta peluang yang tersedia pada lembaga tersebut.
- 4) BMT berfungsi sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Islam yang mampu memberikan kesempatan pembiayaan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil, mikro, menengah dan bawah dengan tidak menentukan jaminan yang akan memberatkan UMKM itu sendiri.
- 5) BMT menciptakan dan memberikan likuiditas.

BMT juga memiliki beberapa fungsi di masyarakat, diantaranya adalah :

- 1) Mengembangkan kesempatan dalam kerja.
- 2) Mampu meningkatkan kualitas usaha dan produk-produk yang dimiliki anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.
- 3) Mengorganisasi serta memobilisasi dana sehingga dana yang telah dimiliki masyarakat bisa dimanfaatkan secara optimal baik dalam lingkup organisasi maupun tidak demi kepentingan banyak orang.

²⁵ *Ibid.*, 225.

- 4) Mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota, pengurus, serta pengelola mmenjai lebih profesional dan amanah dalam menjalankan tugasnya sehingga akan semakin kompeten dalam menghadapi tantangan global.²⁶

Adapun peranan yang dimiliki oleh BMT adalah :

- 1) Menjaga stabilitas keadilan ekonomi masyarakat dengan sistem distribusi yang merata. Fungsi BMT secara langsung berhadapan dengan masyarakat yang erat dituntut harus pandai dalam bersikap, oleh sebab itu langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang perlu diperhatikan, contohnya dalam perkara pembiayaan, BMT harus mengedepankan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah serta jenis pembiayaan yang dilakukan.
- 2) Meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, masyarakat yang sering bergantung pada rentenir mayoritas disebabkan karena rentenir dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam mendapatkan dana dengan cepat. Maka dari itu, BMT harus mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya penyediaan dana setiap saat, sistem kepengurusan yang sederhana, dan lain sebagainya.
- 3) Memberikan pembinaan dan pendanaan terhadap usaha kecil. BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, contohnya memberikan pendampingan, penyuluhan, sosialisasi serta pengawasan terhadap usaha-usaha yang telah dijalankan oleh nasabah.
- 4) Menghentikan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak berdasarkan pada konsep syariah. Banyak melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya sistem ekonomi

²⁶ Rana Ayu Azizah dan Noven Suprayogi, “Analisis Keoptimalan Fungsi *Baitul Maal* pada Lembaga Keuangan Mikro Islam”, JESTT Vol. 1 No. 12 Desember 2018, 844.

yang berlandaskan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pelatihan dan praktik secara langsung mengenai bagaimana cara dalam bertransaksi yang islami, misalnya jujur dengan konsumen, tidak curang dalam menimbang suatu barang yang dijual, dan lain-lain.²⁷

Selain itu, BMT memiliki juga memiliki peran di masyarakat, yaitu :

- 1) Sebagai lembaga penggerak dibidang perekonomian dan sosial masyarakat.
- 2) Sebagai wadah pendidikan bersifat informal guna mewujudkan prinsip hidup yang barakah.
- 3) Berperan sebagai ujung tombak dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam
- 4) Sarana penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin).

BMT merupakan lembaga yang berasaskan pada masyarakat yang *salam*, yaitu penuh akan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Adapun prinsip dasar BMT adalah :

- 1) *Spiritual communication* (penguatan nilai-nilai *ruhiyah*)
- 2) *Barokah*, yang memiliki arti berdaya guna dan memiliki penguatan jaringan, bersifat transparan, dan bertanggung jawab penuh kepada masyarakat.
- 3) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 4) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu'amala* (memberikan kepuasan pada seluruh pihak), serta sesuai dengan nilai-nilai *salam*.
- 5) Tidak diskriminatif, keadilan sosial dan kesetaraan gender.
- 6) Ramah lingkungan.
- 7) Memberdayakan masyarakat dengan cara eningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

²⁷ Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *HUMAN FALAH*: Volume 7. No. 1 Januari – Juni 2020, 22.

d. Status Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Status hukum BMT dapat dikaji berdasarkan bentuk kerja sama yang diterapkan di Indonesia dan telah ada pengaturannya. Bentuk kerja sama tersebut adalah :

- 1) Asosiasi yang bertujuan mencapai dan mendapatkan keuntungan kebendaan :
 - a) Perserikatan perdata (*maatschap*), diatur dalam KUH Perdata.
 - b) Firma (persekutuan firma), diatur dalam KUH Perdata.
 - c) Persekutuan komanditer (CV), diatur dalam KUH Perdata.
 - d) Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat :
 - a) Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata.
 - b) Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - c) Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian.²⁸

Terdapat persamaan dan perbedaan unsur-unsur BMT dengan bentuk usaha lainnya yang dikenal dalam sistem hukum nasional, yakni koperasi dan firma/CV dari aspek para pihak, tujuan, permodalan dan pembagian hasil usaha dan penggunaan nama.

²⁸ Elfa Murdiana, “Menggagas Payung Hukum *Baitul Maal Wattanwil* (BMT) Sebagai Koperasi Syari’ah Dalam Bingkai *Ius Constituendum*”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, 2016, 280.

Tabel 2.1
(Perbandingan BMT dengan Koperasi dan Firma/CV)

| Aspek | Koperasi | BMT | Firma/CV |
|---------------------|---|---|--|
| Status | Badan Hukum | Belum memiliki kesamaan : a. Badan hukum (BMT Koperasi) b. Bukan badan hukum (KSM/LS M) | Bukan badan hukum |
| Struktur Organisasi | Rapat anggota tahunan, pengawas, pengurus | Belum memiliki kesamaan : a. Badan pendiri, badan pengawas, anggota, musyawarah anggota. b. Pemegang simpanan pokok, dewan syariah, pembina manajemen, manajer. | Sekutu Komanditer (Fa) Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementer (CV) |
| Pengatur | UU No.25 | KUH | KUH |

| | | | |
|----|------------|---|---------------------------|
| an | Tahun 1992 | Perdata, KUH Dagang, UU Koperasi, UU Perbankan, UU Perseroan Terbatas. | Perdata- KUH Dagang |
|----|------------|---|---------------------------|

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa BMT memiliki persamaan dan perbedaan unsur dengan koperasi dan firma/CV. Walaupun BMT merupakan institusi yang lahir dari sistem hukum Islam, BMT memiliki kesamaan dengan institusi yang dikenal dalam sistem hukum nasional. Pada saat ini, BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. BMT yang telah berbadan hukum menggunakan badan hukum yang berbeda-beda, ada yang berbadan hukum koperasi dan berbadan hukum yayasan. BMT yang tidak berbadan hukum umumnya menggunakan istilah LSM atau KSM. Penggunaan bentuk koperasi dan KSM atau LSM mengacu pada Buku Panduan BMT yang di keluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau yang sering disebut dengan Pinbuk. Menurut buku panduan tersebut, BMT dapat berdiri dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau koperasi.²⁹

Meskipun belum ada payung hukum (*Umbrella act*) untuk BMT, beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan oleh praktisi BMT yang berkaitan dengan kelembagaan BMT, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian.
- 2) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.

²⁹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aaspek Hukum BMT...*, 103

- 3) Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2129/Bangda.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 5) Romawi II angka I Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

e. Akad dan Produk Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1) Pengertian, Asal Usul dan Konsep Dasar Akad

Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqd* yang dilihat dari etimologi memiliki arti perjanjian, permufakatan dan perikatan. Dilihat dari secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu :

- a) Janji (*al-ahdu*), berdasarkan pada al-Quran surat Ali Imran ayat 76, yang artinya:”*ya siapa saja yang menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa*”. Terdapat juga pada al-Quran surat Al-Maidah ayat 1, yang artinya:”*hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu*”.
- b) Sambungan (*al-ahdu*), akad memiliki arti sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c) Mengikat (*Ar-rabtu*), akad mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lainnya sehingga saling sambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.

Terminologi fikih menjelaskan akad sebagai pertalian ijab dan kabul yang sesuai dengan syariat yang berpengaruh pada objek perikatan (berpindahnya kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain).³⁰

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly.dkk, *Fikih Muamalat*, cet-2 (Jakarta:KENCANA, 2012), 50.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan akad sebagai suatu kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya dalam akad jual beli, pihak pertama menyatakan “saya menjual mobil ini kepadamu dengan harga sekian, tunai” dan pihak kedua menerima dengan menyatakan “saya beli mobil ini dengan harga sekian, tunai”.³¹

Akad mempunyai suatu peranan yang cukup penting didalam kegiatan bermuamalah baik dibidang bisnis, ekonomi maupun keuangan. Fungsi dan pengaruhnya sangat krusial, sehingga transaksi bermuamalah dinyatakan sah jika rukun dan syarat akad dilakukan dengan sempurna. Jika dalam pelaksanaannya rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akad tersebut dikatakan batal. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), suatu akad dikatakan tidak sah apabila akad tersebut melanggar hukum Islam, peraturan dalam Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.³²

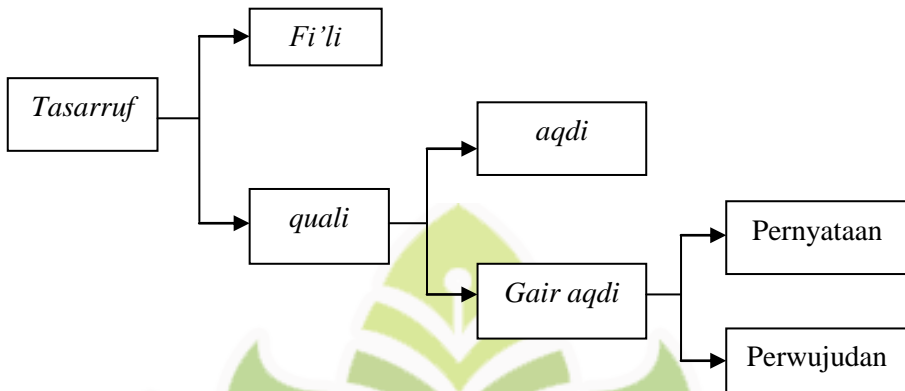
Akad merupakan bagian dari *tasarruf* yaitu segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya. *Tasarruf* terbagi menjadi 2 yaitu *tasarruf fi'li* yaitu usaha yang dilakukan oleh manusia dengan fisiknya, contohnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, dan *tasarruf quali* yaitu *tasarruf* yang keluar dari pengucapan manusia. *Tasarruf quali* terbagi menjadi dua yaitu *aqdi* dan bukan *agdi*. *Tasarruf quali aqdi* adalah ucapan kedua belah pihak yang saling berkesinambungan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan *tasarruf quali* bukan *aqdi* memiliki dua macam yaitu yang pertama pernyataan pengadaan hak, seperti wakaf dan talak. Kedua, tidak

³¹ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*, cet-2 (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.

³² Supani dan Jamal Abdul Aziz, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 1.

menyatakan kehendak tetapi mewujudkan tuntutan suatu hak, misalnya gugatan, ikrar dan sebagainya.
Berikut ini adalah skema asal usul akad :

Bagan 2.1
(Asal Usul Akad)



2) Syarat dan Rukun Akad

Ada beberapa syarat akad yang terdapat dalam hukum Islam diantaranya syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), syarat pelaksanaan (*syurut an-nafaz*), dan syarat keharusan (*syurut al-luzum*). Tujuan dari syarat akad ini adalah agar terhindar dari perselisihan dan mencapai kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan akad.

a) Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*)

(1) Ada dua macam syarat terjadinya akad, yaitu :

Syarat yang bersifat umum (syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam jenis akad apapun)

(a) Kedua belah pihak memiliki kecakapan dalam melakukan akad.

(b) Akad diperbolehkan mmenurut syara', dilakukan oleh pihak yang memiliki hak untuk melakukan dan melaksanakannya meskipun orang tersebut bukan si *Aqid* sendiri.

- (c) Akad yang dilakukan memberikan manfaat.
- (d) Ijab terus berjalan dan tidak dicabut sampai terjadinya kabul.
- (e) Janganlah melakukan akad yang melanggar hukum Syara'.

(2) Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lainnya. Syarat khusus merupakan syarat-syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan, dan seperti tidak diperbolehkannya *ta'liq* dalam '*aqad mu'awazah* dan *aqad tamlik* seperti hibah dan jual beli.³³

b) Syarat Sah (*syurut al-sihhah*)

Syarat sah akad merupakan segala sesuatu yang yang disyaratkan oleh syara' untuk menjamin keabsahan dari dampak akad. Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya rusak, dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Menurut para ulama Hanafiyah, akad akan dinyatakan sah apabila terhindar dari hal-hal berikut :

- (1) Tidak jelasnya harga suatu barang, jenis serta spesifikasinya, waktu pembayaran dan siapa yang bertanggung jawab.
- (2) Keterpaksaan.
- (3) Ada unsur fiktif atau ketidakjelasan.
- (4) Terdapat unsur kemudharatan.
- (5) Syarat-syaratnya rusak, contohnya mensyaratkan pembeli untuk menjual kembali barang tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah.

c) Syarat Pelaksanaan Akad (*syurut an-nafaz*)

Pelaksanaan suatu akad memiliki dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan atau kewenangan. Kepemilikan merupakan sesuatu yang dimiliki oleh

³³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Semarang:PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA,1997), 33-34.

seseorang, yang menjadikan orang tersebut bebas dalam melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Kekuasaan atau kewenangan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mendayagunakan sesuatu yang ia miliki sesuai dengan ketetapan syara'. Misalnya seorang *fuduli* (pelaku tanpa kewenangan), menjual barang milik orang lain tanpa izin dianggap sah tindakannya, tetapi akibat hukum dari tindakan itu tidak dapat dilaksanakan sebab adanya *maukuf* yaitu tergantung pada ratifikasi pemilik barang. Jika pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru.³⁴

d) Syarat Kepastian (*syurut al-luzum*)

Dasar dari akad adalah suatu kepastian, syarat kepastian adalah terhindar dari beberapa opsi (*khiyar*), seperti *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. Apabila masih ada syarat opsi ini didalam transaksi, maka akad tersebut belum memiliki kepastian sehingga transaksi tersebut bisa menjadi batal.³⁵

Rukun akad merupakan suatu unsur yang menentukan terbentuknya suatu akad, adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

- a) *Aqid* yaitu orang yang melakukan akad. Seseorang yang berakad biasanya adalah *aqil asli* atau orang yang memiliki hak dan orang yang ditunjuk sebagai wakil dari yang memiliki hak.
- b) *Ma'qud 'alaih*, yaitu benda-benda yang diadakan atau benda yang dijadikan objek akad. Seperti suatu benda yang dijual dalam akad jual beli, hibah, gadai, utang dan sebagainya.

³⁴ Supani dan Jamal Abdul Aziz.,8

³⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 40-42.

- c) *Maudu' al-aqd*, adalah tujuan atau maksud melaksanakan suatu akad. Seperti pada akad hibah yang bertujuan untuk memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti atau iwad.
 - d) *Sigat al-aqd* yaitu ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang juga berakad yang diucapkan setelah adanya ijab.³⁶
- 3) Akad dan Produk-Produk pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, yaitu melayani masyarakat kegiatan utama BMT meliputi dua kegiatan, yaitu :

a) Simpanan Mudharabah

Simpanan Mudharabah merupakan simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana atau anggota (*shahibul maal*), yang nantinya akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal berdasarkan persentase pendapatan (nisbah) yang telah disepakati bersama. Misalnya pendapatan Rp.1.000.000 dengan nisbah bagi hasil 25% : 30% setiap bulannya.

Macam-macam bentuk simpanan mudharabah adalah :

- (1) Simpanan Aqiqah (SIQAH) yaitu simpanan untuk persiapan qurban dan aqiqah yang disetorkan kapan saja dan diambil 10 hari sebelum Idul Adha.
- (2) Simpanan Pendidikan (SIDIK) yaitu simpanan dana pendidikan yang dapat diambil pada saat akan melanjutkan sekolah/pendidikan.
- (3) Simpanan Hari Raya (SIHAR) yaitu simpanan yang digunakan untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri yang disetorkan kapan saja dan dapat diambil pada 10 hari sebelum Hari Raya.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly.dkk, *Fikih Muamalat*...,52

- (4) Simpanan Berguna (SIGUN) yaitu simpanan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dapat diambil kapan saja.
- (5) Simpanan Walimah (SIWAL) yaitu simpanan yang disiapkan untuk kegiatan walimah seperti nikah, khitan, tasmiyah dan walimah lainnya.
- (6) Simpanan *Wadi'ah* yaitu amanah atau titipan yang dilakukan oleh pemilik dana kepada pihak BMT, dimana BMT memiliki tugas untuk menjaga keutuhan dan keselamatan dana tersebut dan BMT tidak mendapatkan bagi hasil sebab sifatnya hanyalah titipan biasa (amanat).
- (7) Simpanan Ziarah (Simpanan Haji) yaitu simpanan dari anggota yang berencana akan melaksanakan ibadah Haji atau ibadah Umrah.
- (8) Deposito (Mudharabah Berjangka) yaitu simpanan dari anggota pada BMT yang pengambilannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan persentase kesepakatan bersama.³⁷

b) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam hal menyalurkan dana kepada anggota/nasabah melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usahanya baik sebagai modal utama maupun tambahan modal utama sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.

Macam-macam produk pembiayaan yang ada di BMT antara lain :

(1) Mudharabah

Mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian antara pemilik dana BMT (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*) yang keuntungannya

³⁷ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), 65.

dibagi menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat awal perjanjian. Jika terjadi kerugian, maka *shahibul maal* menanggung kerugian dana, sedangkan *Mudharib* menanggung kerugian dalam hal pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

(2) Musyarakah

Musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antar anggota dengan BMT dimana kedua belah pihak mengeluarkan modal yang kemudian digabungkan untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang nantinya akan dikelola oleh anggota. Keuntungan serta kerugian yang terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

(3) Murabahah

Akad murabahah merupakan akad jual beli dimana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa secara angsuran dan sekaligus. Akad murabahah dilakukan oleh anggota sebelum jatuh tempo sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

(4) Ijarah

Akad ijarah merupakan akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak, untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Akad yang terjadi antara BMT (Pemilik Barang) dengan Mitra (Penyewa) dengan angsuran sewa yang sudah termasuk angsuran pokok harga barang sehingga pada akhir masa perjanjian, penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau dihibahkan saja oleh BMT. Karena itu biasanya ijarah disebut dengan ijarah mutahia bittamlik.

(5) Salam

Akad salam yaitu Jual beli dengan cara pesanan, dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang telah disebut spesifikasinya, dan barang dikirim kemudian. Salam biasanya digunakan untuk produk-produk pertanian. Dalam hal ini BMT bertindak sebagai pembeli produk dan memberi uangnya lebih dahulu, sedangkan para mitra menggunakan sebagai modal untuk mengelola pertanian.

(6) *Rahn Tasjily*

Akad *Rahn Tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.

(7) *Bai Bitsman Ajil*

Dalam akad *Bai Bitsman Ajil* pihak BMT memberikan talangan dana terlebih dahulu kepada anggota yang akan membeli suatu barang tertentu yang dibutuhkan. Kemudian pihak anggota akan membayar dan melunasi harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati bersama kepada pihak BMT secara angsur.³⁸

Adapun produk pembiayaan yang tersedia di BMT UGT Sidogiri Capem Gisting, antara lain :

- (1) UGT PAT (Pembiayaan Agunan Tunai) adalah pembiayaan dengan agunan tunai (*cash collateral*) yang ada di BMT UGT dan diblokir sampai pembiayaan lunas.
- (2) UGT GES (Gadai Emas Syariah) adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah Akad Rahn Bil Ujrah.

³⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, .68

- (3)UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (Mudharabah/Musyarakah) atau jual beli (Murabahah) dan Akad Rahn Tasjily (Gadai Surat Berharga).
- (4)UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau berbasis sewa (Ijarah & Kafalah).
- (5)UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah).
- (6)UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau akad Ijarah Muntahiyah Bittamliik.
- (7)UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad Kafalah bil Ujrah dan Wakalah bil Ujroh
- (8)UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang

diharamkan Syariah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (Bai' al Wafa atau Ba'i dan IMBT) atau berbasis sewa (Ijarah atau Rahn Tasjili).

(9) UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah fasilitas pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah, Bai' Maushuf Fiddhimmah atau Istishna') atau Multi Akad (Murabahah dan Ijarah Paralel).

(10) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (Murabahah) atau multi akad (Murabahah dan Ijarah parallel atau Bai' al Wafa dan Ijarah).³⁹

f. Karakteristik Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.⁴⁰

BMT melakukan dua jenis kegiatan, yaitu Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Baitul Tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sementara Baitul Maal menerima titipan zakat,

³⁹ Diakses melalui <https://bmtugtsidogiri.co.id/>, pada 30 Juni 2021 pukul 12.34 WIB

⁴⁰ Tulisan Saifuddin A. Rasyid (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), Sumber : *Republika Online*.

infaq dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

BMT didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat. Sistem bagi hasil sudah merupakan tradisi masyarakat Indonesia sehingga Kehadiran BMT sesuai dengan kehendak dan budaya mereka. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu pengusaha kecil bawah dan kecil dengan memberikan pembiayaan yang dipergunakan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan bisnis ini, usaha anggota berkembang dan BMT memperoleh pendapatan sehingga kegiatan BMT berkesinambungan secara mandiri.

Karakteristik BMT sebagai LKMS, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Karakteristik LKMS (BMT)

| Elemen | Keterangan |
|---------------|---|
| Manajemen | <ul style="list-style-type: none"> a. Peran pengurus sebagai tokoh masyarakat mempengaruhi kinerja manajemen/pengelola. b. Memiliki hubungan yang baik antar-BMT. c. Budaya kekeluargaan dan syariah. |
| Operasional | <ul style="list-style-type: none"> a. Belum memiliki SOP, hanya ada buku pedoman kerja. b. Rata-rata sudah memiliki cabang (dalam area kabupaten). c. Sistem penyimpanan dokumentasi hanya menggunakan <i>filling cabinet</i>, tidak tahan api. d. OH cost 3-6%; BOPO; 67-79% |
| SDM & Orang | <ul style="list-style-type: none"> a. Bentuk kelembagaan : koperasi, |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>kopontren.</p> <p>b. Struktur organisasi sederhana, masih ada jabatan rangkap di pengelola.</p> <p>c. Karyawan 5-75 orang.</p> <p>d. Biaya tenaga kerja per bulan = Rp. 3 juta-Rp.45 juta.</p> <p>e. Pendidikan : setingkat SMU –S2 hanya ada pelatihan <i>basic training</i>.</p> |
| Sistem informasi | a. Rata-rata hanya memiliki komputer <i>stand alone</i> . |
| Rasio Keuangan | <p>a. CAR : 13-18%</p> <p>b. LDR : 74-83%</p> <p>c. BDR : 1-3%</p> <p>d. Aset :Rp.125 juta-Rp.10 Miliar.</p> |
| Pemasaran | <p>a. Target market : multidimensi, untuk seluruh segmen (anggota-nonanggota).</p> <p>b. Sosialisasi menggunakan tokoh masyarakat, kegiatan keagamaan, pendekatan secara silaturahmi.</p> <p>c. Jumlah nasabah tabungan 100-11.000.</p> <p>d. Jumlah debitor 50-200 per A/O.</p> <p>e. <i>Plafond lending</i> : Rp.100.000-Rp.25.000.000.</p> |
| <i>Treasury</i> | <p>a. <i>Pricing</i> ditentukan oleh pengelola.</p> <p>b. Likuiditas terjaga dengan bantuan dari lembaga sejenis.</p> <p>c. Berdasarkan jaminan kekeluargaan.</p> |
| Control/Pengawasan | a. Belum ada <i>unit control</i> yang <i>Independent</i> , masih rangkap |

| | |
|--|--|
| | oleh manajer/pimpinan pengelola. |
| | b. Ada pengawasan terhadap produk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). |

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro. Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan UMKM menjadi empat bagian berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Yang pertama ada industri rumah tangga yang memiliki tenaga kerja sebanyak 1 sampai 4 orang. Kedua adalah industri kecil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 5 sampai 9 orang. Ketiga adalah industri sedang/menengah yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 10 sampai 99 orang. Keempat adalah industri besar yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.⁴¹

Pengertian UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1) Usaha mikro

Kriteria dari UMKM yang pertama yaitu usaha mikro yang dapat diartikan sebagai suatu usaha ekonomi yang produktif miliki individu atau badan usaha yang tentunya memenuhi ciri-ciri sebagai usaha mikro. Saat ini, usaha mikro di Indonesia sudah berkembang dengan pesat dan maju. Banyak wirausahawan yang mendirikan usaha mikro dan dengan adanya usaha mikro ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia.

⁴¹ Rachmawan Budiarto, dkk., *Pengembangan UMKM:Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2015), 2.

Suatu usaha masuk dalam kriteria usaha mikro apabila badan usaha tersebut memiliki omset atau kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal Rp. 300.000.000,- dalam jangka satu tahun.

2) Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omset/tahun) lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Usaha menengah

Usaha menengah merupakan kriteria dari UMKM yang terakhir, usaha menengah merupakan suatu usaha dalam ekonomi yang produktif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak langsung maupun secara langsung bagi usaha kecil dan atau usaha besar.

Kriteria dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan hasil penjualan tahunan (omset/tahun) lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar

lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).⁴²

b. Peran Strategis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam hal pengembangan ekonomi rakyat, sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) menjadi titik sentral didalamnya. UMKM memberikan kontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja dan juga memiliki peran dalam perekonomian nasional. Pada bulan Mei tahun 2021 Menteri Koordinator Airlangga dalam acara virtual *leader, executive & entrepreneur* program industri dan *bussines Institute of Management* (IBIMA) menegaskan berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM, pada saat ini jumlah keseluruhan UMKM mencapai angka 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%. Data tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

UMKM telah mampu membuktikan diri sebagai salah satu solusi pertumbuhan angkatan kerja baru di Indonesia. Posisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional mempunyai peran yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor perekonomian, memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi UMKM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup dominan.⁴³

Usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan didalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perdagangan, perikanan dan rumah makan/restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan

⁴² *Ibid.*,3.

⁴³ Sudati Nur Safiah.dkk., "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 2 2019, 138.

didalam bidang menciptakan nilai tambah disektor hotel, persewaan, keuangan, kehutanan dan jasa perusahaan. Usaha besar memiliki keunggulan didalam industri pengolahan, gas, listrik, komunikasi, dan pertambangan. Kedudukan UMKM dianggap sebagai salah satu solusi dalam pertumbuhan angkatan kerja baru di Indonesia yang sangat tinggi. Sifat intrinsik dari usahanya yang bersifat semi atau nonformal menjadikan UMKM mampu membuka peluang usaha pada kalangan industri rumah tangga. Peran UMKM yang cukup signifikan dalam penyerapan tenaga kerja tersebut menjadikan UMKM sangat efektif dalam memperkuat stabilitas perekonomian nasional.

Kedudukan yang strategis tidak hanya mengacu pada jumlah UMKM yang besar. Dalam perkembangannya UMKM tidak pernah menimbulkan polemik dan memberatkan beban masyarakat dalam perekonomian nasional, sebab UMKM telah menunjukkan ketangguhannya ketika menghadapi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998. Indonesia tidak bisa menghindari krisis ekonomi tersebut yang menimbulkan dampak cukup berat seperti ketidakstabilan nilai mata uang, peningkatan inflasi, peningkatan suku bunga, kelangkaan bahan produksi, konflik multidimensi, serta terjadinya kebangkrutan pada usaha-usaha besar.

c. Perkembangan UMKM

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah mampu menunjukkan eksistensinya diperekonomian Indonesia. Pada saat krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada Tahun 1998 usaha yang memiliki skala kecil dan menengah yang dinilai mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena umumnya usaha kecil tidak bergantung pada modal yang besar atau pinjaman yang besar, selama proses produksi usaha kecil tidak tergantung pada bahan baku impor dan sumber dana yang diperoleh usaha kecil umumnya berasal dari dalam negeri. Selain itu, kondisi tersebut

diperkuat dari karakteristik pelaku UMKM, yaitu sebagai berikut :

- 1) Fleksibel, memiliki arti dimana pelaku UMKM akan mudah berpindah ke usaha lain jika mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya.
- 2) Dapat berkembang dari modal sendiri sebab tidak terlalu bergantung pada modal dari luar.
- 3) Dalam hal pinjaman, sanggup untuk mengembalikan dana pinjaman meski dengan bunga yang cukup tinggi.
- 4) UMKM memiliki berbagai jenis usaha yang tersebar diseluruh Indonesia sehingga UMKM menjadi sarana dan distributor barang dan jasa dalam melayani kebutuhan masyarakat.⁴⁴

UMKM juga memiliki kelemahan yang menjadi hambatan dalam perkembangannya, hal ini mengakibatkan UMKM tidak bisa mengembangkan usahanya dengan mudah jika tidak mendapatkan bantuan modal dalam berkompetisi di dunia bisnis, kelemahan tersebut seperti kurangnya permodalan, kurangnya kemampuan dalam hal manajerial yang dapat mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas dan sulit terselesaikan dalam jangka pendek meskipun pemerintah telah mengarahkan kebijakan-kebijakan yang mendukung UMKM.

d. Permasalahan UMKM

Meskipun UMKM telah lama hadir dalam dunia perekonomian dan terus mengalami kemajuan hingga saat ini, bahkan terbukti mampu membuat Indonesia bangkit dari krisis ekonomi yang terjadi, namun sektor UMKM belum mampu menjadi sektor yang mandiri dan menjadi tumpuan perekonomian nasional. Perkembangan UMKM mengalami beberapa kendala diantaranya adalah :

- 1) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

⁴⁴ Yuli Raahmini Suci, “*Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*”, dalam Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol.6 No.1 Tahun 2017, 6.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan suatu usaha. Pada sektor UMKM, harus diakui bahwa sebagian besar para pelaku UMKM masih dihadapkan dengan permasalahan yang sulit ditangani dengan baik, misalnya tingkat keterampilan, keahlian, kemampuan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup rendah. Rendahnya kualitas SDM merupakan tantangan bagi banyak industri kecil di Indonesia, terutama dalam aspek manajemen, teknik produksi, organisasi bisnis, teknik pemasaran, kewirausahaan, *quality control*, *engineering design*, pemrosesan data, pemasaran dan sebagainya. Padahal, seluruh aspek tersebut seharusnya dikuasai oleh pelaku UMKM untuk mempertahankan dan mengembangkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.⁴⁵

Kualitas SDM yang rendah memiliki dampak pada lemahnya inovasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Tingkat pengetahuan yang rendah, menjadikan kemampuan untuk melakukan terobosan-terobosan usaha menjadi tidak maksimal. Padahal, maksimalnya inovasi menjadi faktor utama untuk bisa memenangkan persaingan pasar. Rendahnya kualitas SDM ini salah satunya disebabkan oleh jenjang pendidikan para pelaku UMKM yang relatif rendah. Kebanyakan usaha yang bersifat informal menjadikan tuntutan akan tingkat pendidikan para pelakunya sedikit terabaikan. Rendahnya tingkat pendidikan ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan manajemen usaha.

⁴⁵ Rachmawan Budiarto, dkk., *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, 26.

2) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar

Salah satu faktor utama lemahnya penetrasi pasar pada UMKM adalah keterbatasan kapasitas produksi dan kualitas yang kurang mampu memenuhi tuntutan pasar. Hal ini tentu jauh berbeda dengan usaha besar yang memiliki jaringan luas serta memiliki teknologi yang canggih yang mampu menjangkau tuntutan pasar hingga skala internasional. Akses pasar UMKM tidak terbentuk secara luas dan tidak ada jaringan yang kokoh. Hal ini menyebabkan efesiensi produksi menjadi rendah dan berdampak pada harga produk yang menjadi lebih mahal dan perluasan pasar yang terlambat. Lemahnya jaringan usaha juga mengakibatkan kesulitan untuk mendapatkan suplai bahan baku yang berkualitas secara terus menerus.⁴⁶

Selain itu, lemahnya akses pasar yang dihadapi menjadikan hambatan yang cukup serius untuk para pelaku UMKM di Indonesia. UMKM tidak cukup memiliki informasi yang lengkap dan rinci terkait pasar mana saja yang dapat ditembus oleh produk yang dihasilkan. Jangkauan pasar yang sangat terbatas meskipun produk yang dihasilkan sudah cukup bagus tidak akan membantu pengembangan UMKM. Lemahnya *Budget* pemasaran yang dimiliki UMKM juga menjadi salah satu kendala untuk memperluas pangsa pasar. Untuk menghadapi hal tersebut tentu dibutuhkan kreativitas dalam menemukan cara pemasaran yang efektif serta meminimalisir dana yang dikeluarkan.⁴⁷

3) Masalah Permodalan

Permodalan adalah sumber utama yang diperlukan dalam menjalankan suatu usaha. Sedangkan dari aspek

⁴⁶ Wiwiek Rabiatul Adawiyah, "*Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*", 2013, 9.

⁴⁷ *Ibid*, 11.

kepemilikan modal, mayoritas UMKM memiliki berbagai permasalahan. Salah satunya adalah tidak memiliki kecukupan modal untuk menjalankan usahanya. Keterbatasan dalam permodalan ini tentu akan berpengaruh buruk pada proses produksi yang dilakukan oleh UMKM. Aksesibilitas pelaku UMKM dalam sumber permodalan dari lembaga perbankan dapat dikatakan rendah. Meskipun banyak skim kredit dari bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Terdapat banyak alasan dalam hal ini, contohnya adalah pengajuan pinjaman yang ditolak karena usahanya dianggap tidak layak untuk didanai, mengundurkan diri karena rumitnya proses administrasi, tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diajukan seperti penyediaan jaminan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu UMKM membutuhkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) karena pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) proses peminjaman dana lebih mudah dari pada bank. Kemudahan akses inilah yang saat ini dibutuhkan oleh UMKM karena pada dasarnya permodalan adalah pokok dari UMKM, tanpa modal pelaku UMKM tidak akan dapat menjalankan usahanya.⁴⁸

4) Masalah Teknologi

Pada sebagian besar UMKM masih saja ditemui kelemahan disisi teknologi. Padahal, pemanfaatan teknologi dalam aktivitas bisnis UMKM akan berdampak pada peningkatan nilai tambah berbagai produk UMKM. Kelemahan teknologi terwujud dalam hal ketidakmampuan UMKM mempertahankan kualitas pelayanan dan produk, kurangnya inovasi, serta sederhananya peralatan dan teknologi produksi yang digunakan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas. Peran teknologi sendiri dinilai dapat

⁴⁸ Bayu Wardhana, "Fungsi Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sebagai Solusi Permasalahan Permodalan UMKM", 2019, 6.

membantu mendorong produktivitas serta pemasaran produk-produk UMKM.⁴⁹

Kegagalan adopsi teknologi sering kali terjadi di UMKM. Dengan adanya keterbatasan SDM-nya, unit usaha ini relatif sulit menggunakan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan daya saing produk dipasaran. Promosi kepada konsumen atas keunggulan kualitas produk UMKM juga masih lemah. Masalah yang dihadapi saat ini adalah minimnya pengetahuan para pelaku UMKM di Indonesia akan teknologi informasi. Kedepannya, para pelaku UMKM ini harus mampu belajar dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seluas-luasnya agar dapat mengembangkan usahanya dan siap untuk bersaing di skala Internasional.⁵⁰

5) Organisasi dan Manajemen

UMKM memiliki sifat tradisional dimana kebanyakan UMKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola usaha serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga ataupun kerabat dekatnya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Lemahnya kemampuan manajemen atau penerapan strategi yang tidak tepat akan berakibat buruk pada penjualan dan jika tidak segera diperbaiki akan berakibat pada kegagalan usaha. Manajemen yang dimaksud adalah manajemen operasi, manajemen keuangan, manajemen informasi, maupun kemampuan dalam mengelola SDM.⁵¹

Keterbatasan akan Sumber Daya Manusia yang dihadapi UMKM, baik dari segi pendidikan maupun

⁴⁹ Amidi, Erna, dan Hari, “Inovasi Teknologi Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, Jurnal Pembangunan Manusia edisi 6, 2018, 6.

⁵⁰ Ibid, 7.

⁵¹ Endah Prihartini, Anwar Sanusi, “Pengaruh Manajemen Pengetahuan dan Inovasi Organisasi Terhadap Kinerja UMKM”, Jurnal Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon Volume 14 No. 2, 2019, 345.

pengetahuan dan keterampilannya memiliki pengaruh penting pada manajemen modern dalam pengelolaan usahanya. Kelemahan manajemen dapat dilihat dalam sistem pengelolaan keuangan, baik dalam pencatatan keuangan atau pemisahan harta keluarga dan harta usaha. Kelemahan dalam organisasi dan manajemen juga dilihat dari sebagian besar UMKM belum mempunyai status badan hukum. Mayoritas UMKM merupakan usaha perorangan dan tidak berakta notaris. Hanya sedikit pelaku UMKM yang menyadari betapa pentingnya badan hukum bagi usaha mereka. Jika dilihat dari sifatnya, memang UMKM dapat berjalan meskipun tidak memiliki badan hukum. Namun, jika para pelaku UMKM memiliki visi dan misi yang sangat jelas sehingga potensi usahanya akan berubah menjadi perusahaan besar pada masa mendatang, peran dari badan hukum sangat diperlukan.⁵²

4. Pembiayaan *Rahn Tasjily*

a. Definisi Pembiayaan *Rahn Tasjily*

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman.

Azhar Basyir mendefinisikan *Rahn* (Gadai) sebagai “perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda sebagai tanggungan diseluruh atau sebagian utang. Dalam hukum adat gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah guna menerima sejumlah uang secara tunai dengan

⁵² *Ibid*, 348.

ketentuan bahwa penjual (penggadai) dapat menerima pengembalian tanahnya dengan cara menebusnya kembali.⁵³

Rahn (gadai) merupakan sebuah akad utang piutang yang disertai agunan (jaminan). Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut *Marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *Rahin*, dan pihak yang menerima jaminan disebut *Murtahin*. Sedangkan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang dengan kesepakatan bahwa jaminan (*Murtahin*) yang diserahkan kepada penerima hanya bukti sah kepemilikannya atau surat berharganya saja, namun fisik dari barang jaminan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan pemilik/pemberi jaminan (*Rahin*).

Secara terminology, ulama fiqh menjelaskan Rahn sebagai berikut :

- 1) Ulama Malikiyah : *Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang mengikat.*

Menurut Ulama Malikiyah sesuatu yang dijadikan jaminan bukan hanya harta yang bersifat materi, tapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh diserahkan secara hukum. Contohnya adalah menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat berharganya.

- 2) Ulama Hanafiyah : *Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik secara keseluruhan maupun sebagian.*

- 3) Ulama Syafiiyah dan Hanabilah : menjadikan materi/barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya.⁵⁴

⁵³ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), 106-107.

⁵⁴ Elimartati, "Perbedaan Ar-Rahn dan Bay' Al-Wafa", dalam *Jurnal Innovatio* (Sumatera Barat: STAIN Batusangkar), Vol. XI, No. 2, Juli-Desember 2012, 325

b. Dasar Hukum *Rahn Tasjily*

Rahn atau gadai hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan pada Dalil Al-Qur'an dan Hadis.

1) Dasar hukum *Rahn* berdasarkan Al-Qur'an :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنْ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّاهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾⁵⁵

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegan (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat: 283).⁵⁵

Surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan, apabila transaksi tersebut terjadi dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, dan tidak mendapat seorang penulis yang dapat menulis transaksi tersebut sebagaimana mestinya maka diwajibkan adanya barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman (menggadaikan).⁵⁶

⁵⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamallah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: PT Maktabah Al-Hanif, 2015), 174.

⁵⁶ Shofiyyun Nahidloh, *Sistem Kredit dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Volume I.Nomor I.Desember 2014, 4

- 2) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a ia berkata :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penggadaian disyariatkan di tempat kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan sebab Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut ketika beliau tinggal di Madinah. Pembatasan penggadaian dengan perjalanan dalam ayat diatas adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi dikarenakan penggadaian sering kali terjadi dalam perjalanan.⁵⁷

Dari ayat dan hadis diatas, jelas bahwa gadai hukumnya boleh baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun tinggal dirumah. Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya adalah kasus *Rahn* pertama dalam Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Para ulama sepakat bahwa akad *Rahn* diperbolehkan karena terkandung banyak kemaslahatan didalamnya.

Selain dasar hukum diatas, gadai syariah juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (ar-rahn) yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Ketentuan Umum

- (1) Murtahin (penerima barang) memiliki hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- (2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali telah mendapatkan izin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 243.

- pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- (3) Pemeliharaan serta penyimpanan Marhun menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan oleh Murtahin sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi tanggungjawab Rahin.
 - (4) Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan oleh besarnya pinjaman.
 - (5) Penjualan Marhun :
 - (a) Murtahin wajib memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya apabila telah jatuh tempo.
 - (b) Apabila Rahin tidak melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi.
 - (c) Hasil dari penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, serta biaya penjualan yang belum dibayar.
 - (d) Kelebihan penjualan menjadi milik Rahinn dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.⁵⁸

c. Rukun dan Syarat *Rahn Tasjily*

1) Rukun *Rahn Tasjily*

Para ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *Rahn*. Namun, bila digabungkan menurut jumhur ulama rukun *Rahn* ada 5, yaitu :

- a) Rahin (orang yang menggadaikan)
- b) Murtahin (orang yang menerima gadai)
- c) Marhun (objek/barang gadai)
- d) Marhun bih (hutang)
- e) Sighat (ijab kabul)

⁵⁸ Ira Ikasa Putri, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak", dalam Jurnal *Audit dan Akuntansi*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura), Vol.2, No. 2, Desember 2013, 4-5.

2) Syarat-Syarat *Rahn Tasjily*

Para ulama fiqh mendefinisikan syarat-syarat *Rahn* sesuai dengan rukun *Rahn* itu sendiri, yaitu :

- a) Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan *Rahn* (*Rahin* dan *Murtahin*) harus cakap bertindak menurut hukum (ahliyyah).
- b) Adanya kesepakatan (sighat) atau ijab kabul sebelum pembiayaan.
- c) Utang atau *Marhun* wajib dibayar kembali oleh *Rahin* kepada *Murtahin*.
- d) *Marhun* (barang).

d. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri.

Produk *Rahn Tasjily* ini bertujuan untuk membantu nasabah ataupun masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan uang sebagai modal awal maupun tambahan modal dalam menjalankan usaha tertentu.

e. Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah memiliki manfaat antara lain :

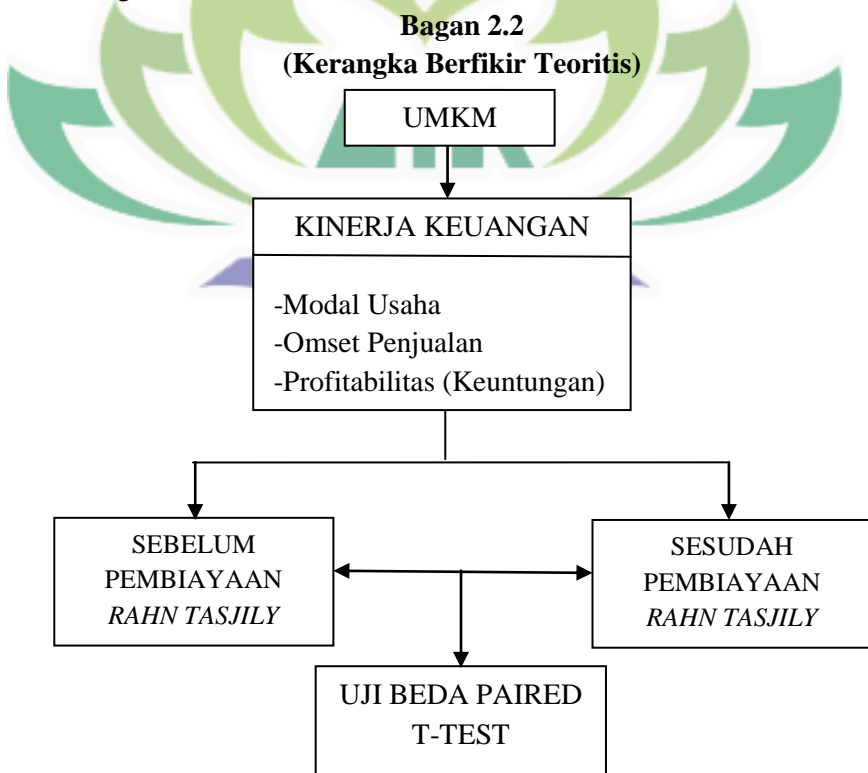
- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem gadai surat berharga yang tidak memberatkan debitur.
- 2) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional, Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.

- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

B. Kerangka Berfikir

Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan UMKM sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dari BMT UGT Sidogiri Capem Gisting melalui akad *Rahn Tasjily*. Adapun Indikator yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan UMKM adalah Modal Usaha, Omset Penjualan dan *Profitabilitas* (Keuntungan).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Siti Jubaedah dan Rina Destiana (2016) tentang *Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah*, maka model konseptual penelitian dapat dijelaskan melalui kerangka berfikir teoritis, sebagai berikut :



C. Hipotesis

Pembiayaan *Rahn Tasjily* adalah produk jasa gadai yang dalam proses pemberian pinjamannya menggunakan akad *Rahn* yaitu akad penyerahan barang/harta (Marhun) dari nasabah (Rahin) kepada pihak lembaga keuangan syariah (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau keseluruhan hutang tetapi barang jaminan tersebut (Marhun) tetap berada dalam penguasaan/pemanfaatan Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin.⁵⁹ Dalam melakukan pembiayaan *Rahn Tasjily*, nasabah memberika kepercayaan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap barang/harta yang dijadikan jaminan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Siti Jubaedah dan Rina Destiana (2016) yang meneliti tentang *Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah*, dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kabupaten Cirebon.

Dari telaah pustaka diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban sementara atas permasalahan dalam penellitian ini adalah sebagai berikut :

- H_0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *Rahn Tasjily* dari Baitul Mal Wat Tamwil.
- H_1 = Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan UMKM sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *Rahn Tasjily* dari Baitul Mal Wat Tamwil.

⁵⁹ Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta:Salemba Empat, 2014), 216.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar – Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.

Ali, Mohammad, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Aqila Smart, *Tips & Trik Mendapatkan Modal Usaha & Mengelolanya*, Jogjakarta: MITRA PELAJAR, 2010.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamallah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: PT Maktabah Al-Hanif, 2015.

Azra, Azyumardi, *Berdema Untuk Semua*, Jakarta: PT.Mizan Publika, 2013.

Basyir, Ahmad Azar, *Asas-Asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*, cet-2, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Budiarto, Rachmawan, dkk., *Pengembangan UMKM:Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Budisantoso, Totok dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman.dkk, *Fikih Muamalat*, cet-2, Jakarta: KENCANA, 2012.

Hitti, Philip K., *History Of The Arabs*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: PT. Fajar Interprata Mandiri, 2010.

Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2010.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Muttaqien , Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.

Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT.Bestari Buana Murni, 2008

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Santoso, Ivan Rahmat, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021.

Siddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA,1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung : ALFABETA, 2017.

Sumawinata, Sarbini, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Supani dan Jamal Abdul Aziz, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.

JURNAL

Ach.Zuhri, *Profitabilitas KPPS MT NU Cabang Larangan Pamekasan Tahun 2018*, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Vol. 3 No. 2, (2020): 264.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/5819>

Adawiyah, Wiwiek Rabiatul, “*Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”, 2013, 9.

<http://jp.feb.unsoed.ac.id>

Agustha, Ilham Nur, “*Perbedaan Pembiayaan Model Bagi Hasil dan Non Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas dan Resiko*”, JESTT Vol. 1 No. 4, (2014): 257.

<https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/480>

Azizah, Rana Ayu dan Noven Suprayogi, “*Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro Islam*”, JESTT Vol. 1 No. 12 Desember 2018.

<https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/547/350>

Baskara , I Gde Kajeng, “*Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*”, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 18, No. 2, (2018): 118.

https://www.academia.edu/download/60920745/jurnal_nasional_mikro20191016-9644-1gv7by0.pdf

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, di Akses pada Tanggal 19 Januari 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Elimartati, “Perbedaan Ar-Rahn dan Bay’ Al-Wafa”, dalam *Jurnal Innovatio* (Sumatera Barat: STAIN Batusangkar), Vol. XI, No. 2, (2012): 325.

https://www.academia.edu/download/53419487/BIMA_ADITYA_WIJAYA_RAHN.pdf

Hapsoro, Bayu Bagus, Palupiningdyah dan Achmad Slamet, “*Peran Digital Marketing sebagai Upaya Peningkatan Omset Penjualan Bagi Klaster UMKM di Kota Semarang*”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (ABDIMAS 23,2)*, (2019): 117-120.

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/17880>

Soritua Ahmad Ramdani Harahap dan Mohammad Ghozali, “*Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat*”, *HUMAN FALAH: Volume 7. No. 1 Januari – Juni 2020*.

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalalah/article/view/4058>

Hari, Amidi, Erna, “*Inovasi Teknologi Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*”, *Jurnal Pembangunan Manusia* edisi 6, 2018,1-14.

<http://ejournal.sumselprov.go.id/pptk/article/view/148/70>

Herman, *Pengaruh Modal, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Omzet Penjualan Pedagang Kios di Pasar Tradisional Tarowang Kabupaten Jeneponto*, *Jurnal Penelitian Ekonomi (JPE)*, 1(1), 2020, 1-10. <http://eprints.unm.ac.id/19629/>

Ira Ikasa Putri, “*Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak*”, dalam *Jurnal Audit dan Akuntansi*, (Pontianak: Universitas Tanjungpura), Vol.2, No. 2, (2013): 4-5. <https://core.ac.uk/download/pdf/298653066.pdf>

Istinganah, Nur Fajar dan Widiyanto, *Pengaruh Modal Usaha, Tingkat Pendidikan, dan Karakteristik Wirausaha Terhadap*

Perkembangan UKM, EEAJ 9 (2) (2020): 438-455.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj/article/view/39293>

Jubaedah, Siti dan Rina Destiana, *Kinerja Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Cirebon Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Syariah*, Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi Volume 2 Isue 2, 2016: 93-103.

<http://journal.uniku.ac.id/index.php/jrka/article/view/458>

Karmeli, Elly, Novi Kedewi Sumbawati dan Suhendrawati, “Pengaruh Modal Usaha Terhadap Omset Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Sumbawa”, 2020. Vol. 1 No. 1 (2020): Prosiding Seminar Nasional IPPeMas 2020

Maarif, M. Ahyar, “Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin”, *Asy-Syari’ah*, Volume 5, Nomor 2, Juni 2019, 40. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>

Murdiana, Elfa, “Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (BMT) Sebagai Koperasi Syari’ah Dalam Bingkai *Ius Constituendum*”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, 2016.
<https://www.academia.edu/download/60446056/1816-6077-1-PB20190831-55685-1hapbau.pdf>

Nahidloh, Shofiyun, *Sistem Kredit dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Volume I.Nomor I, (2014): 4. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4588>

Nasution, Hamni Fadlilah, *Instrumen Penelitian dan Urgensinya Dalam Penelitian Kuantitatif*, (2016): 67. <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/326/1/416-1276-1-PB.pdf>

Polandos, Prisilia Monika,dkk, *Analisis Pengaruh Modal, Lama Usaha, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Langowan Timur*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No. 04, (2019): 39.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/25782>

Prihartini, Endah, Anwar Sanusi, "*Pengaruh Manajemen Pengetahuan dan Inovasi Organisasi Terhadap Kinerja UMKM*", Jurnal Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon Volume 14 No. 2, 2019, 345.
<https://oaj.stiecirebon.ac.id/index.php/jem/article/view/60/60>

Safiah, Sudati Nur.dkk., "*UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa*", Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Volume 4 Nomor 2, (2019): 138.
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1952>

Siregar, Liesma Maywarni, "*Kinerja Keuangan Usaha Mikro dan Kecil*", Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa Vol.5 No.2-Desember 2020,124
<http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/akubis/article/view/151/81>

Suci, Yuli Raahmini, "*Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia*", dalam Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol.6 No.1, (2017): 6.
<https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627>

Sucipto, *Penilaian Kinerja Keuangan*, Jurnal Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan, Jurnal Akuntansi, (2003): 63.
https://scholar.google.co.id/scholar?cites=16766343903057727397&as_sdt=2005&scioldt=0,5&hl=id&scioq=+Elimartati,+%E2%80%99%9CPerbedaan+Ar-Rahn+dan+Bay%E2%80%99+Al-Wafa%E2%80%9D

Surepno, "*Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*", Journal of Sharia Economic Law Volume 1, Nomor 2, September 2018.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>

Utari, Tri dan Putu Martini Dewi, *Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro*

Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol Denpasar Barat, E-Jurnal EP Unud, 3 [12], (2014): 576-585.
<https://www.neliti.com/publications/44496/pengaruh-modal-tingkat-pendidikan-dan-teknologi-terhadap-pendapatan-usaha-mikro>

Wardiningsih, Suprihatmi Sri, “*Pengaruh Modal Kerja, Aset, dan Omzet Penjualan Terhadap Laba UKM Catering di Wilayah Surakarta*”, Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis Vol.5 No.1, (2017):91.
<http://ejurnal.mercubuanayogya.ac.id/index.php/JPSB/article/view/328>

Wardhana, Bayu, “*Fungsi Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sebagai Solusi Permasalahan Permodalan UMKM*”, 2019, 6. <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/3933>

SUMBER ONLINE

<https://bmtugtsidogiri.co.id/>

<https://www.ojk.go.id/> (Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1.)

<https://dsnmui.or.id/> (Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008)

<https://www.republika.co.id/> (Rasyid, Saifuddin A., (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), Sumber : *Republika Online.*)

